

TAJUK RENCANA

Isu Kaesang Gunakan Jet Pribadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempersiapkan konsep pemanggilan putera Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terkait dugaan penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya Erina Gudono. Peristiwa tersebut diunggah oleh Erina di media sosial instagram yang kemudian mendapat sorotan tajam dari warganet, seperti di media sosial X. Bahkan Erina juga memamerkan makan roti seharga Rp 400 ribu. Kasus ini menjadi viral di media sosial.

Kita teringat dengan ungkapan populer di kalangan warganet éno viral no justice, sehingga kasus ini mengundang perhatian lembaga penegak hukum, yakni KPK. Entah ada keterkaitan dengan viralitas atas kasus ini atau tidak, yang jelas, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya sedang mengonsep surat pemanggilan terhadap Kaesang untuk keperluan klarifikasi atas dugaan gratifikasi sehubungan dengan penggunaan jet pribadi dalam perjalanan bersama istri ke AS (KR 31/8).

Boleh saja KPK mengelak bahwa pemanggilan tersebut tidak terkait desakan masyarakat, melainkan karena kepentingan hukum. Namun, bagi kita yang penting adalah perlu untuk menjernihkan persoalan, apakah penggunaan jet pribadi Kaesang bersama sang istri masuk kategori gratifikasi atau tidak. Bahwa pemanggilan tersebut dipicu oleh tuntutan warganet yang viral di media sosial, itu persoalan lain. Karena, jauh lebih penting menentukan apakah penggunaan jet pribadi oleh Kaesang masuk gratifikasi atau tidak.

Dalam persoalan tersebut, kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pemanggilan terhadap Kaesang masih sangat awal, karena baru diundang dalam tahap klarifikasi,

belum sampai pada tahap pro justisia. Kaesang hanya akan diminta keterangan atau klarifikasi seputar isu penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke AS, itu saja. Dari keterangan tersebut nanti akan terungkap apakah fasilitas yang didapat Kaesang termasuk gratifikasi atau bukan.

Bila masuk gratifikasi, sepanjang telah dilaporkan dalam batasan waktu tertentu, tidak masalah dan tak bisa dikategorikan sebagai korupsi, begitu sebaliknya. Artinya, masih terlalu dini untuk menggiring kasus tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Kita menduga, usai Kaesang memberi keterangan kepada KPK, persoalan akan clear. Bahkan, KPK memberi kesempatan kepada Kaesang untuk mendeklarasikan lewat pemberitaan seputar isu tentang penggunaan jet pribadi tersebut kepada masyarakat. Kaesang bisa menjelaskan duduk masalahnya terkait isu tersebut.

Soal apakah deklarasi tersebut berpengaruh terhadap pemanggilan Kaesang di KPK, sepenuhnya menjadi kewenangan Kedeputan Pencegahan dan Monitoring KPK. Hemat kita, isu penggunaan jet pribadi Kaesang dan istri ke AS, bukan hanya menyangkut masalah hukum, melainkan etika dan empati. Rasanya tidak patut memamerkan kekayaan (flexing) di tengah situasi masyarakat yang sedang dilanda kesulitan ekonomi.

Tentu wajar bila warganet kemudian mempersoalkan, bahkan menghujat tindakan Erina Gudono yang mengunggah di akun instagramnya tentang kemewahan saat bersama Kaesang menaiki jet pribadi dalam perjalanan ke AS. Apalagi memamerkan saat menyantap roti atau kue seharga Rp 400 ribu. Tindakan semacam ini bisa melukai hati rakyat, yang untuk makan sehari-hari saja masih susah. □-d

Menyambut Kunjungan Paus Fransiskus

Paulus Mujiran

PAUS Fransiskus akan melakukan lawatan ke Indonesia pada 3-6 September 2024 ini. Ini menjadi lawatan apostolik ke-43 sepanjang masa pontifikalnya. Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang akan mengunjungi Indonesia. Sebelumnya ada Paus Paulus VI (3 Desember 1970) dan Paus Yohanes Paulus II (8-12 Oktober 1989). Dalam Gereja Katolik, Paus memiliki otoritas spiritual tertinggi dan sebagai wakil Kristus di dunia.

Paus Fransiskus menjabat sejak 13 Maret 2013 dan merupakan Paus ke-266. Mengambil nama kecil Jorge Mario Bergoglio lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Kunjungan apostolik pertama dilakukan di Brazil tahun 2013 pada perayaan Hari Orang Muda Sedunia. Paus kemudian pergi ke Tanah Suci di mana dalam lawatan beliau menyatakan hak ekstensi Negara Israel dan hak bermartabat bagi rakyat Palestina, juga menyatakan penghargaan dan kedekatannya dengan komunitas muslim.

Bagi Indonesia kunjungan kepausan ini semakin menggrakabkan kedua negara mengingat historisitas pada masa lalu. Perlu dicatat Vatikan merupakan negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara Mesir adalah negara pertama di Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kata Paus Pius XII yang kala itu memutuskan mengakui kemerdekaan Indonesia, iIndonesia adalah sahabat perdamaian sejati.

Karena itu perlu mendapat dukungan dan dorongan saat dalam perjuangan berat setelah merdeka. iAmicus certus in re, incerta cernitur, sahabat sejati dikenal saat-saat sulit, kata Cicero. Memperhatikan terminologi yang digunakan Paus seperti pemerintahan, keseimbangan dan stabilitas merupakan terminologi yang lebih bersifat politis daripada religius.

Dengan ini wajah Vatikan sebagai sebuah negara yang bertindak dan bersuara dalam konflik-konflik internasional, memainkan peran aktif da-



Ketiga, Paus juga bertemu pemimpin negara yang bertujuan membahas isu-isu sosial politik dan kemanusiaan. Dan keempat, kunjungan ke situs penting seperti katedral basilika, tempat ibadah agama lain. Kelima memberikan pesan moral dalam setiap kunjungan Paus memberikan pesan moral dalam homili yang berisi pesan moral, sosial dan spiritual ajakan untuk memperkuat iman, mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial di alam semesta.

Kunjungan apostolik ini mempunyai dampak besar, tidak hanya bagi umat katolik tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam setiap momentum kunjungan apostolik melekat tiga hal pokok antara lain melakukan dialog. Dialog dilakukan dengan berbagai cara bahkan bisa dengan cara kompromi untuk membangun jembatan. Selain itu perhatian kepada yang paling kecil, lemah, tersingkir dan teraniaya khususnya di negara-negara yang sedang berkembang atau negara yang membutuhkan dukungan eksternal.

Juga perlindungan hak-hak yang paling mendasar dari manusia terkait aspek kebebasan beragama dan hak yang berkaitan sipil, politik, ekonomi dan sosial. Rupanya kunjungan apostolik ke Indonesia harus dibaca dalam konteks ini. Dan yang pasti Paus Fransiskus akan menyuarakan pentingnya nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. □-d

\*) Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang.

**Persyaratan Menulis**  
Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pilkada, Sampah, dan Rintang Kebijakan

Ashari Cahyo Edi

PILKADA serentak akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada 27 November mendatang. Sejak beberapa waktu lalu, sudut-sudut ruang publik dipenuhi poster kandidat kepala daerah dan wakilnya. Baik yang resmi ditetapkan oleh koalisi partai maupun yang tebar pesona untuk dikenal warga. Semuanya mengikrarkan janji-janji politiknya.

Kita tahu janji-janji tersebut tak selalu terwujud. Namun, untuk tujuan diskusi, mari kita andaikan semua kandidat adalah para figur pembaharu yang siap bekerja untuk rakyat. Sejauh mana mereka bisa mewujudkan agenda perubahan?

Bertolak dari dalil Schattschneiderian bahwa kebijakan menstrukturkan politik (Béland, Campbell, & Weaver, 2022), siapa pun yang terpilih kiranya sulit lepas dari perangkat kebijakan lama yang mengakar. "Kebijakan, setelah diterapkan, akan membentuk kembali proses politik berikutnya" (Skocpol, 1992: 52). Apalagi, "kebijakan sering berkembang seiring waktu dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh pembuatnya, karena dinamika yang mereka ciptakan sendiri" (Mettler, 2016: 369).

Mari gunakan masalah sampah dan tata kelolanya sebagai ilustrasi. Warisan kebijakan persampahan masa lalu, baik yang terkait langsung maupun tidak, telah membentuk dinamika politik yang berisiko merintang penyelesaian masalah sampah dan perbaikan tata kelolanya.

Saya akan fokus pada dua aspek, yakni dampak warisan kebijakan terhadap warga dalam bersampah yang berwawasan lingkungan, serta penyempitan problematisasi berikut agenda setting kebijakannya di masa depan.

**Kewarganegaraan Sampah**  
Pertama, kebijakan persampahan saat ini berkontribusi dalam melahirkan kesadaran kewarganegaraan (sense of citizenship) yang kurang mendukung penyelesaian masalah sampah dan perbaikan tata kelolanya. Status pengelolaan sampah sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar tidak memberikan justifikasi kepatutan politik yang cukup bagi elite pembuat kebijakan di daerah untuk mengalo-

kasikan anggaran memadai. Minimnya alokasi APBD menyebabkan pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk melakukan pendidikan kesadaran bersampah yang baik. Warga, yang idealnya sadar untuk berperilaku hidup rendah sampah, serta mampu memilih-memilih sampah sejak di tingkat rumah tangga, belum tersentuh oleh kebijakan-program yang komprehensif. Tak pelak, interaksi warga dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah terbatas pada pembayaran iuran kepada pelaku usaha pengambilan sampah. Padahal, iuran tersebut hanya mencakup biaya operasional pengambilan dan pengiriman sampah ke TPST.

Absennya kesadaran warga bahwa iuran belum mencakup biaya kerusakan lingkungan belum terjamah oleh intervensi edukasi pemerintah. Dominannya perasaan sebagai konsumen layanan melemahkan perasaan warga negara yang berhak bersuara dalam proses kebijakan. Akibatnya, akumulasi pembelajaran keliru dari praktik kebijakan masa lalu menyulitkan inisiatif edukasi pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dari kepala daerah terpilih.

**Problematisasi Sampah**  
Kedua, berbagai warisan kebijakan terkait sampah juga memperkuat problematisasi masalah sampah dan agenda kebijakan tertentu, sambil melemahkan alternatif-alternatifnya (Bacchi, 1999). Padahal, pilihan problematisasi masalah sampah mencerminkan pilihan solusi tertentu, sehingga opsi-opsi keterkaitan antara problematisasi dan solusi lainnya menjadi terpinggirkan.

Misalnya, meskipun kesadaran itu penting, problematisasi masalah sampah selama ini terlalu didominasi oleh isu rendahnya kesadaran warga. Sebaliknya, problematisasi masalah sampah sebagai hasil dari politik anggaran yang hanya

memprioritaskan program-program pembangunan yang melayani kepentingan ekonomi dan politik para elite, hilang dari peredaran.

Konsekuensinya, para kepala daerah pembaharu yang terpilih akan menghadapi problematisasi masalah sampah yang didominasi oleh pandangan bahwa penyebab utama masalah sampah adalah kurangnya kesadaran warga, serta agenda kebijakan yang fokusnya hanya pada pendidikan kesadaran mengenai pengelolaan sampah. Bukan perihal, semisal, bagaimana penguatan kontrol publik agar berbagai keputusan politik dalam alokasi APBD untuk program perangkat daerah dan pokir DPRD sudah benar-benar berpihak bagi penyelesaian masalah sampah dan tatakelolanya.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk merespons dua aspek tantangan di atas? Secara garis besar, pasangan kandidat terpilih perlu memahami proses dan mekanisme di mana warisan kebijakan menciptakan insentif sumber daya dan pembelajaran politik, yang justru menimbulkan rintangan bagi upaya terobosan dan inovasi pembangunan.

\*) Ashari Cahyo Edi, Dosen DPP Fisiopol UGM, Studi S3 Ilmu Politik di SUNY Albany, INFID Research Fellow 2021-2022.

**Pojok KR**  
KPK ajak anggota Dewan perangi korupsi.  
-- Artinya harus perangi diri sendiri. \*\*\*  
Polda Jateng deklarasi zero knalpot brong.  
-- Tindak juga geng motor langgar aturan. \*\*\*  
Dinpar DIY genjot pariwisata Pantai Baru.  
-- Tak hanya genjot pendapatan, juga pelayanan.

*Berabe*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisariss Utama: Imam Satriyadi, SH.  
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.  
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.  
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.  
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.  
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSo.  
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.  
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.  
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
Perwakilan dan Biro:  
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani .  
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.  
Banuyamus : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.  
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.  
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.  
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.